

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir,2007).

Adapun tahap dalam pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988). Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam

wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran, kondisi suatu negara dapat dilihat apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2008). Pengangguran memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan banyak perubahan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

Di era globalisasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh semua negara di dunia khususnya negara seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 kurang lebih mencapai 268 juta jiwa. Jika tidak tersedia lapangan kerja yang memadai dengan jumlah penduduk sebanyak itu maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam sistem Islam Negara (Khilafah), kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan mengaktifkan sektor ekonomi real (pertanian, Industri dll). Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Yang artinya:

*“Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).”*

Selain itu, Islam mewajibkan kepada setiap individu laki-laki untuk bekerja. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, *“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.”* Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2019).



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2020, n.d.)

### Gambar 1.1

Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2013-2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat selama tujuh tahun penelitian, tingkat pengangguran pada tahun 2013 sebesar 6,17 persen dan kian menurun hingga tahun 2019 sebesar 5,28 persen, walaupun sempat mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 6,18 persen. Data tersebut bisa menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia kian meningkat seiring menurunnya angka pengangguran terbuka. Tetapi perlu diteliti lebih jauh tentang angka pengangguran di tiap daerah di Indonesia.

Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius. Dampak dari pengangguran sendiri yaitu permasalahan ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha. Pengangguran juga berdampak

pada penghambatan investasi, karena menurunnya jumlah tabungan masyarakat. Dari segi sosial, pengangguran akan menimbulkan perasaan minder (rendah diri) pada masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, munculnya pengamen, pengemis, anak jalanan, dan tingginya anak-anak yang putus sekolah.

**Tabel 1.1**  
Data 5 Provinsi  
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Indonesia  
Tahun 2013-2019

NO	PROVINSI	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	BANTEN	9.54	9.07	9.55	8.92	9.28	8.52	8.11
2	JAWA BARAT	9.16	8.45	8.72	8.89	8.22	8.17	7.99
3	MALUKU	9.91	10.51	9.93	7.05	9.29	7.27	7.08
4	KEP. RIAU	5.63	6.69	6.2	7.69	7.16	7.12	6.91
5	SULAWESI UTARA	6.79	7.54	9.03	6.18	7.18	6.86	6.25

Sumber: Pengangguran BPS 2019

Perkembangan angka pengangguran terbuka di Indonesia yang kian membaik dan menurun juga diikuti dengan berkembangnyatingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten dengan dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa perkembangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten semakin membaik di tiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 berkembangnyatingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten sebesar 9,54 persen dan terus membaik sampai tahun 2019 sebesar 8,11 persen, walau sempat terjadi kenaikan pengangguran di tahun 2015 menjadi 9,55 persen. Hal ini dapat diartikan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sudah berjalan dengan baik.

Pengangguran merupakan permasalahan serius, sehingga berbagai usaha ataupun kebijakan perlu dilakukan pemerintah. Kebijakan dapat berupa tujuan yang bersifat ekonomi dan sosial. Tujuan bersifat ekonomi ada tiga pertimbangan utama, yaitu untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial politik yaitu pertimbangannya untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan dan untuk mewujudkan kestabilan politik (Sukirno, 2008).

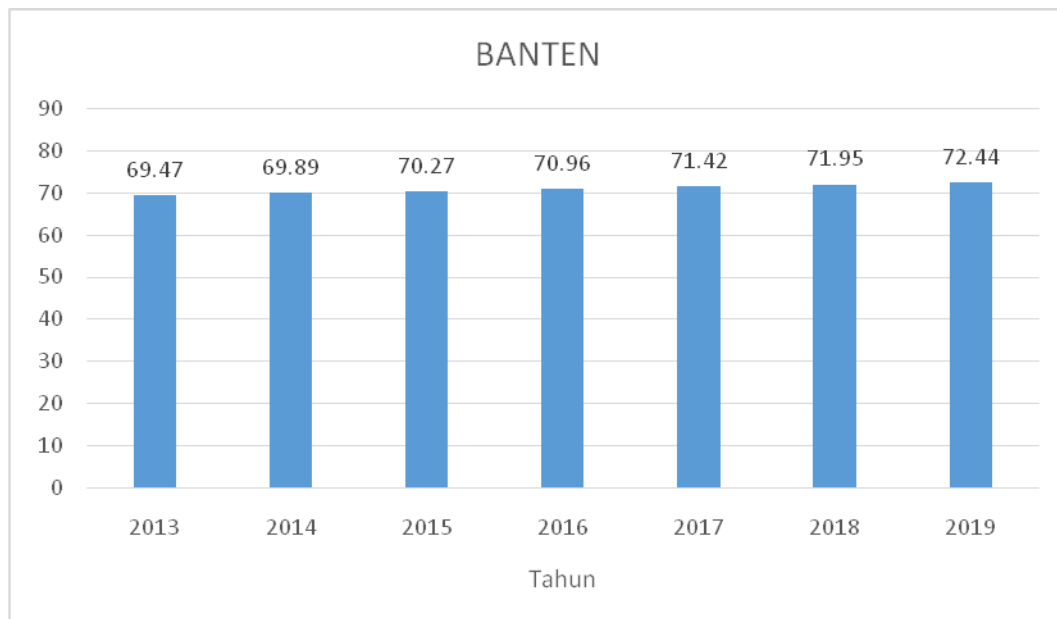
Selama ini, berbagai kebijakan dibuat disetiap pemerintahan untuk menanggulangi masalah pengangguran, kebijakan yang didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dimentori oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), merancang berbagai program untuk dapat mengatasi masalah pengangguran. Beberapa program diantaranya, memberikan pendidikan gratis untuk meningkatkan taraf pendidikan, pelatihan tenaga kerja disetiap daerah, job fair, serta bimbingan dan bantuan untuk berwirausaha. Dikutip dari info Badan Statistik Pusat (BPS) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34 persen.

Menurut Sukirno (2015), permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk di bahas dan merupakan isu penting, karena dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain: Indeks Pembangunan Manusia,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Investasi yang dalam hal ini yakni Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pembangunan manusia juga berpengaruh terhadap pengangguran. Pembangunan manusia merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Baeti, 2013).

Indikator dalam menentukan tinggi rendahnya pembangunan manusia menggunakan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah / negara.



Sumber: BPS Banten 2019

**Gambar 1.2**  
Data IPM di Provinsi Banten Tahun 2013-2019

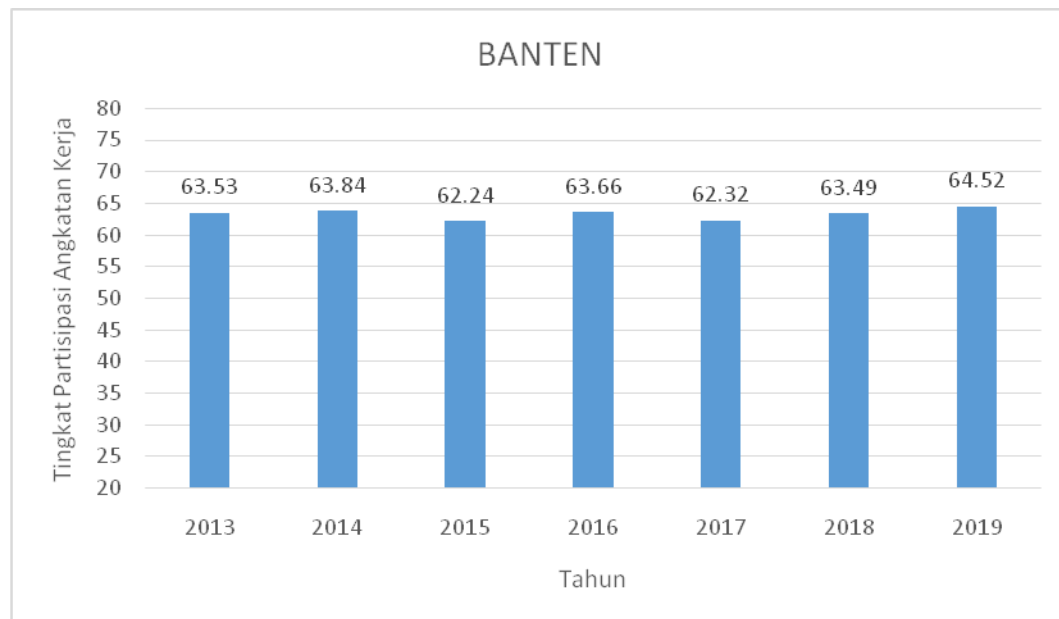
Data pada gambar1.2 di atas menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan 2014, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten berada pada rentang kategori “sedang” karena berada dibawah angka 70, sedangkan pada rentang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori “tinggi” karena telah melewati angka 70. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi berbagai peningkatan yang positif di Provinsi Banten baik dari indikator hidup sehat, indikator harapan sekolah/pendidikan maupun indikator hidup layak/ekonomi. Hal ini pun sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten dalam 5 tahun terakhir.



Pembangunan ekonomi dapat dilihat dan diukur dengan cara membandingkan jumlah produksi barang dan jasa dengan tahun sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dimiliki dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, contohnya seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan teknologi. Sumber daya manusia merupakan faktor input dalam proses produksi pendapatan nasional, jadi artinya semakin besar jumlah tenaga kerja semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dalam perekonomian Indonesia terdapat persoalan dan yang harus diselesaikan yaitu jumlah penduduk yang bertambah semakin banyak setiap tahunnya akan berakibat bertambahnya jumlah angkatan kerja, dengan kata lain jumlah orang yang mencari pekerjaan juga akan meningkat. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tenaga kerja yang mempunyai skill dan ketrampilan merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Naiknya jumlah angkatan kerja membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,12 persen poin.



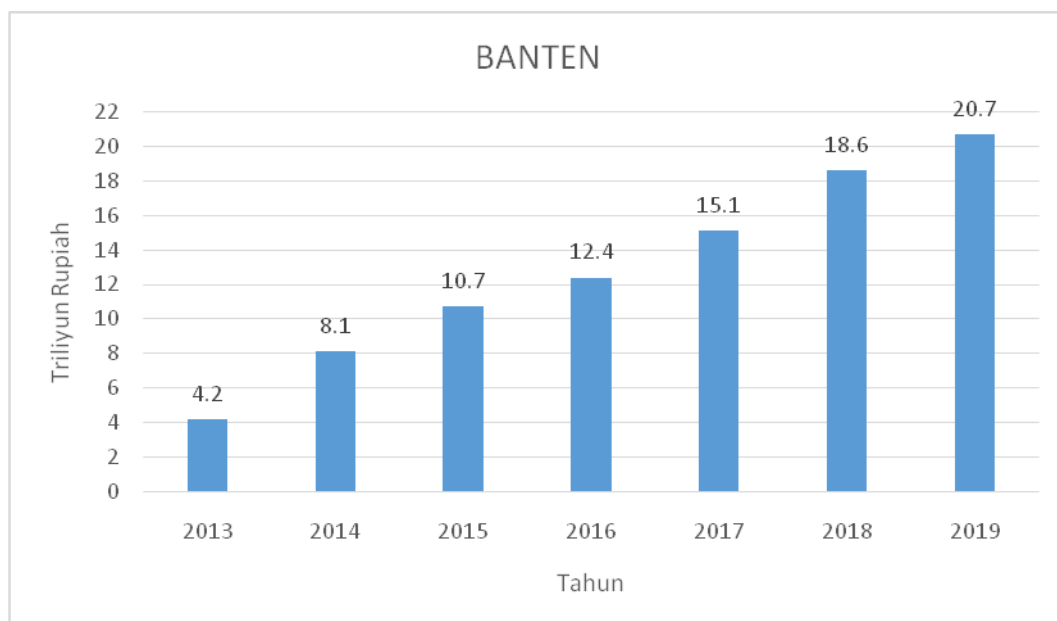
Sumber: BPS Banten 2019

**Gambar 1.3**  
Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Banten  
Tahun 2013-2019

Data pada gambar 1.3 di atas menjelaskan tentang tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2015 dan 2017 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 62,24 dan 62,32 persen, akan tetapi ketika tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu mencapai 64,52 persen.

Adapun investasi merupakan salah satu dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, karena investasi bisa menentukan perkembangan jumlah pengangguran. Semakin besar investasi maka pengangguran akan berkurang, disaat invesatasi tinggi pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan akan menyerap angkatan kerja lebih banyak.

Investasi menurut sumbernya terbagi menjadi dua macam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri merupakan penggunaan kekayaan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung guna menjalankan suatu usaha. Hal ini akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional.



Sumber: (Bkpmpt, 2019)

**Gambar 1.4**  
Data Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Banten  
Tahun 2013-2019

Pada gambar 1.4 diatas menjelaskan tentang perkembangan nilai investasi di sektor penanaman modal dalam negeri di Provinsi Banten dari tahun 2013 hingga tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya investasi dalam negeri diharapkan akan memberikan suntikan dana bagi para pemilik usaha di berbagai bidang. Ketika para pelaku usaha kian mengembangkan usaha mereka, tentu akan berdampak pada taraf kesejahteraan yang kian membaik.

Dalam penelitian ini merujuk ke beberapa penelitian sebelumnya dengan pengkajian ketiga variabel di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Panca Dwi Mulyo (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel IPM memiliki hubungan bertolak belakang, artinya ketika nilai IPM turun akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Begitu pula sebaliknya jika nilai IPM naik maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunani Tiya Kasanah, Anifatul Hanim, P. Edi Suswandi (2016) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki hubungan yang berbanding lurus, artinya ketika nilai tingkat partisipasi angkatan kerja turun akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Begitu pula sebaliknya jika nilai tingkat partisipasi angkatan kerja naik maka akan menaikkan tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Neza Hafiizh P. dan Prof. Dr. Pudjihadjo, SE., MS (2015) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penanaman Modal

Dalam Negeri, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB tahun 2009-2013”. Hasil penelitian menunjukkan variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel penanaman modal dalam negeri memiliki hubungan yang berbanding lurus, artinya ketika nilai penanaman modal dalam negeri turun akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Begitu pula sebaliknya jika nilai penanaman modal dalam negeri naik maka akan menaikkan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Banten, oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis mengambil judul *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.
3. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.

### C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wilayah Provinsi Banten.
2. Deret waktu (time series) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2019.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Penanaman Modal Dalam Negeri.**

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2013-2019.
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian tentang Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Sebagai referensi penelitian yang memudahkan peneliti lain ketika melakukan penelitian di lingkup yang sama.
5. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca yang lain.